KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Busri

IAIN Pontianak
E-Mail: busrysihhat@gmail.com

ABSTRACT

Fiscal Policy is a country's economic policy. This policy is a benchmark for the country's economic prosperity and justice. The aim of fiscal policy is to change and improve a country's economy. Islam requires this policy for the welfare and justice of society. Several principles put forward by Ulama in Islam: Tauhid, Rub-Biyyah, Caliphate, and most recently the principle of Tazkiyah, but more importantly using two principles of fiscal policy, namely the principle of public revenue and the principle of state expenditure. Among the differences between Islamic and conventional fiscal policies is that Islam requires this policy to ensure economic stability that is fair and balanced. Meanwhile, the aim of conventional fiscal policy is to achieve maximum profits. Fiscal policy in Indonesia uses a democratic system where budget plans are submitted and discussed in parliament and determined as the State budget.

Keywords: *Fiscal Policy, Perspective Islamic*

ABSTRAK

Kebijakan Fiskal ialah sebuah kebijakan suatu Negara dalam ekonomi. Kebijakan ini menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan dan keadilan ekonomi Negara. Tujuan diadakannya kebijakan fiskal mengubah dan meningkatkan perekonomian suatu Negara. Islam mengharuskan kebijakan ini untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Beberapa Perinsip yang kemukakan Ulama dalam Islam: Tauhid, Rub-Biyyah, Khalifah, dan yang terahir perinsip Tazkiyah, tetapi yang lebih utama menggunakan dua prinsip kebijakan fiskal yaitu perinsip penerimaan publik dan perinsip pengeluaran Negara. Diantara perbedaan kebijakan Fiskal Islam dan konvensional adalah Islam mengharuskan kebijakan ini untuk kesetabilan perekonomian yang adil dan seimbang. Semetara tujuan kebijakan fiskal konvensional untuk meraih keuntungan sebesar besarnya. Kebijakan fiskal di Indonesia menggunakan sistem demokrasi dimana perencanaan anggaran diajukan dan dibahas di parlemen dan ditetapkan menjadi anggaran Negara.

Kata Kunci: Kebijakan fiskal, Perspektif Islam

Pendahuluan

Setiap pemerintahan pasti selalu mengadakan perencanaan untuk anggaran pendapatannya atau biasa dikenal (RAPBN) yang diajukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyatnya.guna di shkan dan ditetapkan lalu menjadi Anggaran Pendapatan Negara. Perekonomian semakin sejahtera pasti juga dipengaruhi oleh kebijakan Fiskal Negara yang berlaku adil pada setiap

masyarakatnya tidak pandang bulu semua disamaratakan. Kebijakan Fiskal menurut Islam telah ada sejak dulu bahkan pada abad ketujuh pertama kali Nabi memimpin pemerintahan pada saat itu kemudian para shahabat juga meneruskan dengan berpegang teguh sesuai ajaran Islam itu sendiri

Pada masa Rasulullah sudah mulai mengkonsep pemasukan dan pengeluaran negara, (Hasdiana, 2018). Ketentuan inilah yang menjadi tauladan bagi negara muslim pada saat itu hingga saat ini mulai mengkonsep kebijakan fiskal yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Kebijakan Fiskal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam biasa dikenal dengan kebijakan Konvensional dengan menekankan kekayaan dan keuntungan perorangan tanpa mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bersama.

Kebijakan Fiskal kontemporer tentu berbeda dalam segi praktiknya dengan kebijakan fiskal klasik pada masa Rasulullah dan para sahabat namun tidak berbeda dalam ketentuan hukumnya. Perbedaan ini disebabkan beberapa faktor seperti fasilitas negara, SDM, teknologi dan perkembangan zaman pada masa kontemporer dengan masa terdahulu seperti contoh pada masa Rasulullah ada penerimaan negara dari peperangan tapi pada masa kontemporer ini tidak ada pemasukan itu karena memang tidak ada peperangan.

Kebijakan Fiskal Islam bertujuan menciptakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sesuai dengan ajaran Islam. Arti tujuan dengan ajaran Islam ini diantaranya adalah: terciptanya kesejahteraan masyarakat lengkap dengan pengemannya, menjalankan kehidupan sosial dengannya harus melestarikan keimanan, berintelektualitas, memanfaatkan kekayaan juga kepemilikan. Islam juga menekankan beberapa prinsip yang harus ditaati seperti dalam bermuamalah dengan sesama manusia harus tidak melanggar aturan bermuamalah dan selainnya meskipun ada kebebasan melakukan segala hal, (Sugianti, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian disini penulis menggunakan kajian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang temuannya bukan menggunakan cara statistik atau dengan cara berbentuk hitungan, (Arif, 2023). Penulisan ini menggunakan pendekatan kajian pustaka, atau sering juga disebut sebagai tinjauan literatur, adalah proses sistematis dalam dikumpulkannya, analisis juga merangkum

informasi yang bersumber dari beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian. Kajian pustaka ini penting dalam konteks penelitian ilmiah karena memberikan landasan teori, kerangka konsep, serta penjelasan dan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti (Creswell, 2009)

Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumen dari teks keagamaan dan literatur ekonomi Islam untuk merinci prinsip-prinsip Kebijakan Fiskal. Proses analisis data akan menggunakan analisis konten kualitatif dengan fokus pada identifikasi pola, tema, dan konsep-konsep utama terkait kebijakan fiskal dalam Islam. Dari hasil analisis data diatas di intrpretasikan merujuk pada kerangka teoritis ekonomi Islam dan perinsip kebijakab fiskal. Menggunakan metode ini penulis bermaksud memberikan pemahaman tentang apa kebijakan ini yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal

Pengertiannya bisa ditemukan secara bahasa berasal dari dua kata, yang pertama kebijakan lalu fiskal. Kalo dilihat dari kebijakanya pasti memiliki makna yang sangat banyak karna tidak semua kebijakan harus mengarah pada kebijakan fiskal. Contoh saja kebijakan yang diartikan oleh beberapa toko seperti Aberaham Kaplan, Harold, dan yang lainnya, kebijakan adalah rencana dan apa yang akan dikerjakan dengan dengan bermaksud pada nilai peraktik yang nyata juga trarah, (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022).

Sementara pengertian kebijakan fiskal sebuah kebijakan pemerintah dalam perekonomian yang dipergunakan mengelolah ekonomi agar terus berkembang dan membaik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, (Aisyah & Nurmala, 2019). Lalu Islam melalui para pemikir ekonominya merumuskan kebijakan fiskal Islam ini harus sesuai dengan ajaran yang dibawakan Rasulullah, sehingga menghasilkan hukum pada distribusi yang seimbang, dan memeraktekkan nilai-nilai dan spritual di posisi yang sama, (Sugianti, 2017). Kebijakan pemerintah atas pendapatan dan pengeluaran dalam Islam harus selalu berimbang atau pemerataan antar masyarakat tidak hanya bermamfaat untuk suatu golongan tertentu.

Al-Ghazali, kebijakan fiskal suatu setrategi dengan maksud mencapai tujuan Syariah, dengan memaksimalkan kekayaan alam dan tetap menjaga iman, jiwa, kekayaan ilmu, dan aset, (Dwiyanti et al., 2023). Beliau mengartikan pada kebijakan fiskal ini setrategi atau cara pemerintah dalam hal penerimaan/pendapatan dan pengeluaran negara tetapi cara yang beliau ajarkan juga tetap menjaga iman, kekayaan alam dan ilmu, dan aset negara. Dengan cara inilah atau strategi pemerintah berperan dan bisa menimbulkan keadilan dan kesejahteraan, terus mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga bisa bersaing dengan yang lain.

Islam tidak melarang dalam hal pengembangan perekonomian dan peningkatan aturan-aturan selama tidak ada dalil yang mengarahkan keharaman peraturan tersebut. Dalam artian pengembangan kebijak-kebijakan fiskal ini tidak dilarang, dan tidak harus sama dengan aturan yang ada pada masa Rasulallah karna setiap masa pasti berbeda kebutuhan masyarakat, yang dimaksud harus sesuai dengan yang telah diajarkan Rasulallah adalah maksud atau tujuanya seperti kebijakan pemerintah yang tidak ada pada masa Rasulallah tetapi harus ada pada saat sekarang karna bisa menimbulkan maslahat dan menghilangkan kemudharratan.

Prinsip-Prinsip Kebijakan Fiskal Islam

Para ulama dan beberapa ahli mekemukakan beberapa prinsip kebijakan ini seperti ulama Khurshid Ahmad beliau membagi beberapa prinsip tentang ekonomi Islam dengan 4 bagian diantaranya: Prinsip Tauhid, Rub-Biyyah, Khalifah, dan yang terahir prinsip Tazkiyah. Prinsip tauhid yaitu mengarahkan meskipun dalam melakukan dan mengembangkan perekonomian tetap mengesakan Allah SWT, Rub-Biyyah agar manusia sadar bahwa kepemilikan mutlak didunia ini adalah Allah semua yang dimiliki hanyalah titipan.

Sementara prinsip dasar Ekonomi Islam dalam Kebijak Fiskal ada dua Yaitu, (Aini, 2019):

a. Prinsip Penerimaan

- 1) *Dharibah*, Pemungutan prinsip ini pihak yang bertugas harus menjamin. Bahwasannya dibagi diantara yang kaya atau kelebihan harta bisa berkewajiban lebih banyak daripada yang miskin dalam

dharibah. Pemungutan *dharibah* ini tidak berdasarkan input tetapi tabungan.

- 2) Dalam pemungutan pajak tidak ada paksaan seperti pada masa Rasulullah, (Rusby, 2014).
- 3) Merata pada semua golongan
- 4) Sektor tertentu hanya pada penerimaan publik

b. Prinsip Pendapatan

- 1) Distribusi Zakat sudah menjadi ketetapan Allah
- 2) Harus mendatangkan mamfaat dan menghindari kemdhorratan
- 3) Keadilan tidak memihak pada yang kaya
- 4) Komitmen

Dalam Islam Diperlukan suatu lembaga dengan pegawai yang bertanggung jawab lembaga ini berisikan orang-orang yang dapat dipercaya karna akan dipergunakan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Sejarahnya Rasulullah pada masa kepemimpinan beliau menggunakan lembaga Baitulmal untuk pengelolaannya dan menerapkan anggaran yang brimbang (*balance budget*) jadi semua anggaran penerimaan itu hbis oleh pengeluaran pemerintah bukan untuk suatu golongan apalagi perorangan (*goyerment expenditure*) (Dwiyanti et al., 2023). Agar semua prinsip dan syariah yang ditetapkan dalam ajaran Islam dapat berjalan dengan adil dan berimbang.

Sejarah Kebijakan Fiskal Islam

1) Masa Rasulullah

Rasulallah yang memimpin pemerintahan pertama dalam Islam (Dwiyanti et al., 2023). Rasulullah juga yang memiliki hak menentukan kebijakan - kebijakan pada saat itu. Masa beliau ini tidak ada pemasukan pada negara dikarnakan belum ada sumber pendapatan sama sekali pertama Rasulullah memimpin sangat diuji dengan kesabaran dan keikhlasan jangankan untuk mengadakan kebijakan pemasukan negara pada saat itu dihadapkan dengan kesulitan ekonomi yang sangat luar biasa. Usaha yang dikerjakan pada masa awal Islam itu atas dasar keikhlasan dan pengabdian dalam memperjuangkan agama Allah dan membela Rasulullah. Jadi belum ada sistem penggajian bagi para pemimpin semuanya

berkerja dengan atas keikhlasan dengan berdakwah dan memperluas kekuatan Islam.

Awal perjuangan beliau ini belum memiliki tentara. Bahkan semua orang yang masuk Islam baik yang pereempuan boleh menjadi tentara dan membela agama Allah bahkan semuanya memiliki semangat yang sama berjuang untuk agama Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulallah. Semuanya ini tida ada yang gaji karna atas dasar keikhlasan dan pengabdian mereka hanya boleh menerima harta rampasan dalm peperangan seperti senjata, kuda, unta bahkan budak yang berhasil ditawan dari tentara musuh dalam peperangan.

Setelah tahun ke 2 Hijriyah, pada perang Badar negara ada mempunyai penghasilan ada tiga sumber penghasilan pada saat itu diantaranya: dari kaum muslim, non muslim, dan sumber lainnya.

- a. Zakat: Ada ada dua macam pertama zakat fitrah: merupakan kewajiban semua orang muslim baik yang sudah balig atau yang balig dan zakat mal diwajibkan bagi mereka yang mempunyai hata lebih.
- b. Ushr: Pemasukan dari para pedagang diukur dengan penghasilanya atau keuntungan. Ushr ini hanya satu kali setiap tahunya adapun Ushr ini hanya berlaku pada barang yang nilainya diatas 20 dirham
- c. Wakaf, Wakaf ini dari orang muslim yang mewakafkan hartanya untuk perjuangan Islam
- d. Dan yang trahir dari Amwal Fadhla, sedekah seperti hibbah, kurban dan juga kafarat

Pemasukan negara pada masa itu bersal dari beberapa pemasukan namun hal yang paling pokok masih berasal dari ushr dan Zakat. Ushr ini pemasukan yang paling besar karna pada saat itu bisa diklompokkan dan gampang dirinci seperti yang berasal dari orang muslim, non muslim dan penghasilan lainny (Iswandi, 2013). Penghasilan Ushr ini diukur dengan keuntungan para pedagang tidak diukur dengan harta yang dimiliki karna pembayaran Ushr ini tidak sama dengan pembayaran Zakat dengan menerapkan penarikan ushr atas dasar keuntungan maka tidak ada rasa paksaan terhadap para pedagang yang membayar Ushr seperti contoh apabila Ushr ini diterapkan atas dasar kepemilikan maka para

pedagang yang masa-masa itu tidak memiliki keuntungan akan sama dengan porsi pengeluaran Ushr yang memiliki keuntungan perdangan masa itu.

Pengeluaran negara pada masa Rasulullah terbagi dua bagian seperti primer dan sekunder (Hasdiana, 2018). Pengeluaran primer meliputi

- 1) Untuk pertahanan
- 2) Para penerima Ushr dan Zakat yang sudah ditetapkan Allah
- 3) Uang Bisyaroh meliputi: Pejabat Negara, Imam, Muadzin, dan Guru
- 4) Para pejuang yang sukarela biasanya juga mendapatkan bisyaroh
- 5) Membayar Hutang Negara
- 6) Pembiayaan yang diberikan kepada Musyafir di daerah Padak

Pengeluaran primer ini biasanya lebih di prioritaskan dari pada pengeluaran sekunder seperti Bantuan yang diberikan para pencari ilmu di Madinah. Sementara untuk Duta Negara ada juga pengeluaran khusus, seperti hadiah, membebaskan orang muslim yang menjadi tawanan musuh. Semua pengeluaran dan pemasukan ini memang terkonsentrasi dari rakyat untuk rakyat tidak di peruntukkan golongan tertentu apalagi perorangan tertentu. Sehingga dengan keadilan dan pemerataan ini masyarakat tidak ragu dalam menghibahkan sebagian hartanya untuk pemasukan negara, bahkan ada yang sampai memberikan separuh hartanya seperti Sayyidina Umar R.A dan semua hartanya seperti Sayyidina Abubakar As- Siddiq R,A.

2) Masa Abubakar As- Siddiq R,A

Abu Bakar melakukan beberapa langkah untuk menyempurnakan perekonomian saat itu seperti: Memprioritaskan pengelolaan Zakat, mengembangkan Baitulmall juga petugas yang bertanggung jawab, penerapannya sama dengan Nabi (*Balance Budget policy*) pada Baitulmall, Penindakan hukum bagi kaum Muslim yang tidak mengeluarkan Zakat, dan beliau juga ahli dalam akad-akad perdagangan yang sesuai dengan Syaria Islam (Dwiyanti et al., 2023).

Perombakan pada saat itu beliau memfokuskan terhadap pembayaran Zakat. Karena setelah wafatnya Rasulullah awal-awal kepemimpinan beliau peristiwa dan masalah baru terjadi seperti tidak maunya orang-orang muslim melakukan pembayaran Zakat, banyaknya orang muslim yang keluar dari agama Islam karena menganggap Islam telah selesai dengan meninggalnya Rasulullah,

dan yang lebih parah ada yang mengaku Nabi atau utusan yang menggantika Nabi Muhammad seperti Muzailamatul Kaddab. Dari inilah awal kepemimpinan beliau terjadi beberapa masalah bahkan masalah disebabkan oleh orang muslim itu sendiri sehingga beliau berinisiatif untuk untuk berperang melawan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan keluar dari Agama Islam (Perang Murraddin).

3) Masa Umar Bin Khattab

Setelah Sahabat Abubakar diteruskan oleh Umar Bin Khattab. Beliau merupakan pemimpin yang ketiga setelah Abubakar banyak yang yang beliau berikan pada masa kepemimpinannya menjadi khalifah termasuk dalam bidang perekonomian diantaranya adalah: Membangun gedung perkantoran Baitulmall dengan mengadakan dival yang pertama kalinya dalam Islam (Divan merupakan Perkantoran dalam pengelolaan penmabyaran tunjangan angkatan perang jugan para peensiunan negara serta tunjangan lainnya), Tanggung jawab pemerintah pada warganya meskipun Non Muslim, Verifikasi pada penerima Zakat serta nominalnya, Pajak pertanian dan UUD tetang tanah. Karna pada masa kepemimpinan beliau ini Islam terus mengalami perkembangan kepemilikan wilayah di jazirah arab.

Pendapatan Negara pada masa beliau di kelompok-kelompokan seperti adanya Penarikan Zakat da Ushr, Khumus dan Sedeqah, Fay dan Jizyah dan terahir ada Sewa. Penerimaan yang diakomidir di Baitulmall ini masih ada pengelompokan tertentu karna setiap pendapat negara akan di perjelas guna pengeluaran yang jellas juga. Dalam pengeluaran seperti untuk masyarakat lokal guna mensejahterkan faqir, miskin juga ada anak-anak yang sudah ditinggal wafat orang tuanya dalam peperangan.

4) Masa Ustman Bin Affan

Pertama masa kepemimpinan Utsman Bin Affan mencoba meneruskan perkembangan di masa Umar Bin Khattab seperti kebijakan yang dikeluarkan Umar bin Khattab selama 6 tahun beliau memimpin melakukan beberapa hal seperti:

- a) Membangun saluran perariran untuk kebutuhan umum
- b) Membentuk penjaga keamanan dalam melindungi masyarakat

- c) Membangun tempat penegakan hukum (pengadilan)
- d) Kebijakan pertanahan

Pada masa beliau juga ada peningkatan yang signifikan baik dalam bidang perekonomian, keamanan, hukum, dan sistem yang sangat luar biasa. Beliau pertama masa memimpin meneruskan kebijakan-kebijakan Sahabat Umar Bin Khattab dan terus mengembangkan kebijakan peluasan negara dan sistem pemerintahan. Meskipun peluasan wilayah masa Sayyidina Ustman tidak sebesar pada masa Sayyidana Umar tapi beliau memiliki kelebihan tersendiri dalam kepemimpinannya seperti dalam pembangunan tempat untuk menegakkan keadilan (pengadilan), membangun tatanan Negara yang lebih tersistematis dan perekonomian yang sangat luar biasa.

5) Masa Ali Bin Abi Thalib

Pada masa beliau mengkonsep dalam hal Adminitrasi dan pemerintahan. Kebijakan konsep ini beliau umumkan dalam surat yang beliau keluarkan dalam surat tersebut beliau mendiskripsikan kewajiban dan hal yang diharamkan bagi penguasa dan penyusun beliau menekankan yang harus menjadi pereoritas adalah keadilan, kontrol pada pejabat negara, meminimalisir dalam pendapatan pegawai adminitrasi dan bendahara. Kebijakan Sayyidina Ali beliau mulai dengan menata para pejabat Negara yang memimpin pemerintahan di bawah kepemimpinan beliau dalam memprioritaskan keadilan yang berdampak kesejahteraan pada masyarakat. Keadilan yang seharusnya merata bisa dirasakan oleh semua golongan tidak untuk golongan tertentu apalagi orang-orang tertentu, dan ada kebijakan-kebijakan yang beliau larang bagi para pemimpin Negara.

Beliau juga melakukan perubahan-perubahan kebijaka yang besar dalam kepemimpinannya ada beberapa kebijakan dan perubahan pada masa Ali Bin Abi-Thalib antaranya adalah: Semua pendapatan Negara yang ada di Baitulmall harus di distribusikan hanya menyisakan beberapa untuk cadangan saja, Menghilangkan pengeluaran keamanan laut, pengetatan anggaran ahrus di tingkatkan demi keadilan dalam mendistribusikan anggaran Negara, pada yang Sipatnya harus di utamakan dan yang tidak diutamakan.

Perbedaan Fiskal Islam dan Konvensional

Perbedaan pasti ada baik dari pengelolaan, penetapan, tujuan, dan lainnya karena Islam sendiri mempunyai aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik melalui ketetapan Al-Qur'an, Al-hadist, Ijmak, Qiyas, dan Fatwah para Ulama kontemporer para ahli dalam bidang perekonomian dan semuanya sama harus bertujuan keesejahteraan dan keadilan yang sifatnya umum juga pengelolaannya tidak melanggar aturan Syari'ah Islam.

1. Kebijakan Fiskal Menurut Islam

Seperti yang telah dijelaskan diatas kebijakan fiskal islam mempunyai aturan tersendiri baik dari segi tujuannya. Jika mengacu pada kebijakan Fiskal masa Rasulullah ada beberapa pendapatan yang meliputi Zakat, Kharraj, Khumus, Jizyah, dan denda (Triwahyuni, 2021). Sementara tujuan-tujuan Kebijakan Fiskal Islam ini diantaranya adalah Menetapkan kesamarataan dan demokrasi dalam pendapatan agar kekayaan itu tidak menumpuk pada satu kepemilikan Individual, ada juga tujuan yang ditetapkan dalam aturan Islam yang sudah ada dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi guna untuk peningkatan perekonomian yang terus berkembang dan merata. Terealisasinya persamaan dan demokrasi Islam menetapkan keduanya pada temat yang luhur menjunjung tinggi keadilan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat kekayaan dengan rasa saling belaskasihan dan pemerintah pemegang kendali kebijakan. Luasnya kesejahteraan pada Islam dalam kehidupan di dunia dan aherat seperti meningkatkan sepiritual lebih diutamakan ketimbang material (Suprayitno, 2018).

2. Kebijakan Fiskal Konvensional

Perbedaan yang sangat signifikan tampak pada tujuannya seperti contoh dalam Islam untuk pemerataan kesejahteraan pada semua kalangan dan lebih menekankan sepiritual daripada material. Konvensional malah mengkonsep kesejahteraan yang bersifat individual seperti dengan mengambil keuntungan tanpa balas kasih pada yang lainnya, maksimum didunia dengan tanpa meratakan pendapatan dengan yang lainnya. tidak adanya peningkatan sepiritual dari material.

Perbedaan yang signifikan pada kebijakan konvensional dan kebijakan fiskal dalam Islam terletak pada tujuan diadakannya kebijakan fiskal sendiri. Dalam

Islam bermaksud untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pemerataan Pendapatan serta ditambah tujuan-tujuan yang terkandung dalam ajaran Islam (Musyarofah, 2017). Semetara tujuan kebijakan fiskal konvensional untuk meraih keuntungan sebesar besarnya dengan tanpa meratakan pendapatan (Dwiyanti et al., 2023). Kebijakan konvensional tidak memberikan konsep kesejahteraan hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya itupun bukan keuntungan secara merata pada setiap masyarakat melainkan hanya keuntungan individual (Suprayitno, 2018). Perbedaan ini menunjukkan pada para pelaku ekonomi yang mau mempelajari perbedaan dari konsep ekonomi konvensional dan konsep ekonomi yang sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.

Kebijakan Fiskal Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan pertama pembahasan setiap negara tidak mungkin tidak ada kebijakan fiskal dalam setiap masa kepemimpinan Negara tersebut termasuk Indonesia. Pemerintahan yang ada di Indonesia pasti membuat perencanaan anggaran dan pendapatan setiap tahunnya dan kebijakan ini disusun dan diajukan kepada dewan perwakilan rakyatnya (DPR) untuk disahkan menjadi anggaran tahunan. Secara sederhana menurut APBN negara Indonesia terdiri dari Pendapatan negara dan hibah (Rozalinda, 2016). Sementara ada juga pendapatan murni didalam Negri sendiri yang terdiri dari Infastruktur, Pajak, sumber daya alam. Dengan banyaknya sumber daya alam pada Negara ini yang mana meliputi minyak bumi, dari hasil perhutanan dan pertanian, pertambangan yang dikelola oleh badan negara untuk penghasilan Negara yang sudah seharusnya di distribusikan kepada masarakat dengan secara adil juga merata guna untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia.

Sementara untuk pengeluaran Anggaran Negara di Indonesia terdiri dari beberapa kepentingan seeperti: Pegeluaran Negara pusat, Gaji para pegawai Negara, Barang dan modal, Subsidi energi dan yang tidak, Bantuan untuk bencana alam yang tidak terduga, Keamanan Negara baik untuk Polri dan TNI, dana otonomi, Dana untuk anggaran pendidikan dan kesehatan (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022). Pemerintah Indonesia menggunakan demokrasi dimana aturan belanjanya sudah menjadi ketetapan yang disepakati melalui parlemen pada setiap tahunnya. Setiap yang sudah dibahas dan ditetapkan dengan parlemen

barulah dimuat menjadi APBN seperti contoh Semua rencana anggaran akan diajukan kepada DPR di Parlemen barulah ketikata sudah di musyawarahkan dan ditetapkan akan menjadi APBN setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Mengartikan Kebijakan Fiskal ialah sebuah kebijakan suatu Negara dalam ekonomi. Kebijakan ini menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan dan keadilan ekonomi suatu Negara dengan kebijakan ini bertujuan mengubah dan mngembangkan perekonomian. Islam mengharuskan kebijakan ini agar tidak melanggar aturan Syariah yang telah ditetapkan dengan menjadikan Rasulullah sebagai tauladan utama, selalu mengutamakan kekayaan yang berimbang dan menerapkan nilai seperitual lebih diutamakan dari material. Beberapa Perinsip yang kemukakan Ulama dalam Islam: Tauhid, Rub-Biyyah, Khalifah, dan yang terahir perinsip Tazkiyah, tetapi yang lebih utama menggunakan dua prinsip kebijakan fiskal yaitu perinsip penerimaan publik atau pendapatan negara dan perinsip pengeluaran negara. Islam mengenal dan membahas kebijakan fiskal sejak masa kepemimpinan Rasullah hingga saat ini.

Kebijakan fiskal yang tidak Islami atau Konvensional terdapat perbedaan baikdari cara pengelolaan dan tujuan diadakannya kebijakan Fiskal. Islam mengahruskan kebijakan ini untuk kesetabilitan perekonomian yang adil dan seimbang. Semetara tujuan kebijakan fiskal konvensional untuk meraih keuntungan sebesar besarnya dengan tanpa meratakan pendapatan dan hanya meeengedepankan kekayaan individual. Sementara kebijakan fiskal di Indonesia menggunakan sistem demokrasi dimana perencanaan anggaran diajukan dan dibahas di parlemen dan ditetapkan menjadi anggaran Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam. *Syariah*, 7(2), 16.
- Arif, M. S. (2023). Dasar Hukum Dan Metodologi Pengembangan Ekonomi Syariah. *Ekonomi Syariah*, 6(2656-968x.), 18–30.
- Creswell, J.W. (2009). *Third Edition Research Design Qualitative, Quantitative*

And Mixed Methods Approaches John.

- Dwiyanti, S., Wahyudi A, Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (2023). Kebijakan Aini, I (2019). Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760fiskal> Dalam Perspektif Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23 (1), 109–
- Hasdiana, U. (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In E. Widiyanto (Ed.), *Analytical Biochemistry* (Pertama, Vol. 11, Issue 1).
- Iswandi, L. M. (2013). Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 7(2), 375–395. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/63>
- Musyarofah, N. A. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Sains Dan Seni Its*, 6(1), 51–66.
- Rozalinda. (2016). Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. In *Raja Grafindo Persada* (Pp. 12 – 39). Rajawali Pers.
- Rusby, Z. (2014). *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam* (S. Tambak (Ed.)). Pusat Kajian Pendidikan Islam Fai Uir.
- Sugianti, E. (2017). No Kebijakan Fiskal Perspektif Agama Islam. *Jurnal Sains Dan Seni Its*, 6(1), 51–66.
- Suprayitno, E. (2018). Kebijakan Fiskal Zakat Dan Pajak Pada Perekonomian (Studi Komparatif Ekonomi Islam, Klasik Dan Keynes). *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 9 (2), 193–221. <https://doi.org/10.18860/Ua.V9i2.6215>
- Triwahyuni. (2021). Peraturan Menteri Keuangan (Pmk). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 199–210.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6 (1), 69–83.